Musik *Kakula* Yang Politis Melampaui Politik

Arhamuddin Ali

Peneliti Musik

arhamuddinali@gmail.com

Abstrak

Essai ini merupakan respon atau pembacaan ulang terhadap buku “Musik Itu Politik, Studi Hubungan Pengaruh Kebijakan Kebudayaan pada Perubahan Musik”. Data, analisis dan kesimpulan buku ini dibaca ulang dengan perspektif politik estetika Ranciere. Musik *kakula* yang dibahas dalam buku ini dijelaskan dari masa ke masa, yaitu dimulai dari masa pra Kolonial hingga konteks saat ini. Terlihat berbagai macam perubahan yang terjadi akibat pengaruh kebijakan politik setiap eranya. Sejak era pra kolonial hingga era orde baru, musik *kakula* dikuasai dengan kepentingan politik. Namun, berdasarkan pembacaan ulang yang dilakukan, justru musik *kakula* mampu bergerak keluar dari politik rezim penguasa dengan menempatkan diri setara dengan kelompok-kelompok dominan. Melalui *kakula* batas antara “kita vs mereka” ditiadakan, kemudian dimaksud sebagai yang politis.

Kata kunci: Musik *Kakula*, Politik, dan Yang Politis

Abstract

This essay is a response or rereading of the book "Music is Politics, Study of the Relationship of the Effect of Cultural Policy on Music Change". The data, analysis and conclusions of this book are reread from the perspective of Ranciere's aesthetic politics. The kakula music discussed in this book is explained from time to time, starting from the pre-Colonial period to the present context. There are various kinds of changes that occur due to the influence of political policies in each era. From the pre-colonial era to the new order era, kakula music was dominated by political interests. However, based on the re-reading that was carried out, it was found that kakula music was able to move out of the politics of the ruling regime by placing itself on a par with dominant groups. Through the boundary between "us vs them"

Keywords: *Kakula Music, Politics and the Political*

I. Pendahuluan

Politik selalu mengandaikan adanya lawan. Selalu ada logika “kita” versus “mereka”. “Mereka” bukan bagian dari “kita”. “Mereka” tidak masuk dalam lingkaran “kita”. Tetapi, “kita” harus mengatur “mereka” agar “mereka” tidak merusak tatanan sosial yang “kita” bangun.

Membaca buku Musik itu Politik tulisan Mohammad Amin mengantar saya membaca sebuah peristiwa politik musik yang kompleks dari masa ke masa. Berbicara musik politik ataupun politik musik dalam konteks buku tersebut membuat kita bersentuhan dengan berbagai dimensi, baik itu sejarah, ideologi, sosial, budaya, ekonomi, tradisi lisan, gender, persebaran agama, kolonialisme, kesenian, terkhusus ruang perjalanan kebudayaan yang terjadi di Sulawesi Tengah. Padahal yang menjadi fokus pembahasan adalah *Kakula*, yaitu satu jenis seni bebunyian masyarakat Kaili, Sulawesi Tengah. Justru melalui *Kakula* ini, kita bisa menyentuh dimensi luas yang menjadi bagian tentangnya. Hal itulah yang memperkuat kesimpulan Mohammad Amin bahwa sebenarnya musik itu politik. Disini saya mencoba *mereview* tulisan dari Mohammad Amin dari buku yang berjudul Musik itu Politik.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis narasi pada buku Musik itu Politik tulisan dari Mohammad Amin.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berbicara mengenai politik, saya kembali pada ungkapan saya pada awal tadi, bahwa politik selalu berbicara tentang “kita” versus “mereka”. Logika ini nampak jelas dari catatan Mohammad Amin mengenai geneologi *Kakula* sejak dibawa oleh komunitas Melayu ke tanah Kaili hingga perkembangannya saat ini. Setiap patahan-patahan sejarahnya selalu sarat dengan kepentingan politik, baik itu politik identitas, kekuasaan, ekonomi dan lain-lain.

Saya melihat Mohammad Amin membagi babakan geneologi *Kakula*, antara lain era Pra Kemerdekaan, era NIT (Negara Indonesia Timur), era Sukarno, orde baru, hingga reformasi. Di setiap era tersebut mencerminkan karakteristik politik yang menentukan keberlangsungan *Kakula*. Kita bisa melihatnya pada era pra kemerdekaan ketika orang-orang Melayu berlabuh di pesisir Palu, mereka membawa gong berpencong yang kemudian menjadi simbol persahabatan Penguasa Kaili dan Melayu kala itu. Selanjutnya pada era NIT gong

berpencong tersebut yang kemudian disebut *Kakula* digunakan menjemput pejabat-pejabat NIT yang berkunjung. Begitu juga pada era Sukarno yang identik dengan politik ideologis antara realisme sosialis dan humanisme universal, serta penggolokan dan jawanisasi kesenian oleh oknum pejabat negara atau keluarganya di era orde baru, hingga kemudian berkembang menjadi identitas personal di era menjelang hingga terjadinya reformasi, dan sampai saat ini.

Mari kita melihat keberadaan *Kakula* pada masa pra kemerdekaan yang dijelaskan dalam buku tersebut. *Kakula* menjadi simbol persahabatan para penguasa Kaili dan Melayu. Dalam konteks ini, *Kakula* disponsori oleh kerajaan. Seringkali kesenian ini digunakan dalam pelantikan *magau/raja*. Selain dari pada itu, juga digunakan pada upacara pernikahan *madika/bangsawan* dan *paranaka/keturunan* melayu. Perlu diketahui bahwa *Kakula* hanya boleh dimainkan oleh keluarga bangsawan, di mana para wanita dari darah bangsawan kerap diajarkan khusus oleh orang tuanya.

Pada era ini juga, *kakula* menjadi identitas pembeda yang dibentuk oleh adanya kebijakan politik etis Belanda di luar pulau Jawa. Pendidikan yang dihasilkan

oleh politik etis mengajarkan musik diatonis melalui pembelajaran musik tiup bambu dan paduan suara. Sedangkan *Kakula* yang latar belakangnya merupakan gong berpencong bawaan orang Islam Melayu tidak diajarkan pada sekolah-sekolah bentukan politik etis tersebut. *Kakula* justru berkembang di kerajaan dan digunakan pada kegiatan-kegiatan kelompok bangsawan.

Kakula mengalami pergeseran di era NIT. Jika sebelumnya diperuntukkan untuk kalangan kerajaan, di masa ini *Kakula* justru digunakan untuk menjemput pejabat-pejabat NIT yang berkunjung ke tanah Kaili. Ada pergeseran fungsi secara sosial yang dipengaruhi oleh kebijakan politik kala itu. Tergerusnya kekuasaan kerajaan oleh kehadiran pemerintahan NIT menjadi salah satu penyebabnya.

Derasnya arus politik ideologi pada era Sukarno juga turut berpengaruh pada perkembangan *Kakula*. Pada masa ini, lahir *Kakula* Kreasi Baru yang disponsori oleh pemerintah. Hasan Bahasyuan adalah aktor utama perkembangan kesenian tersebut. Olehnya, *Kakula* kerap digunakan menjemput tamu negara/*tomaoge* sesuai dengan permintaan pemerintah. Di samping itu, perkembangan *Kakula* digunakan mengiringi tarian, yaitu tari *pamonte* dan

pajoge maradika. Ini kemudian dijadikan sebagai identitas nasional oleh Presiden Sukarno kala itu.

Memasuki era orde baru, *Kukula Nuada Talise* yang awalnya sebagai identitas *madika-paranaka*, juga mengalami perkembangan secara meluas di masyarakat. Kali ini sudah ada yang membuat *Kakula* dari bahan plat besi dan tangki petromax. *Kakula* tidak lagi diperuntukkan untuk kalangan bagsawan dan pemerintah saja, tetapi bisa digunakan oleh kalangan yang mampu membiayai pertunjukannya. Walaupun bisa diperuntukkan bagi semua kalangan, namun pewarisannya masih berlangsung dalam sistem kekerabatan.

Di masa orde baru ini, peranan TMII (Taman Mini Indonesia Indah), Golkar dan Taman Budaya cukup berpengaruh terhadap perkembangan *Kakula*. *Kakula* sering dipertunjukkan di TMII dan itu cukup mempengaruhi perkembangan estetisnya karena kerap kali dicampuri oleh pejabat atau istri Presiden RI. Bentuk penyajian *Kakula* harus disesuaikan dengan selera pejabat tersebut, misalnya peranan wanita hanya sebagai penyanyi, menggunakan kostum berwarna kuning, dan dinamikanya harus halus layaknya gamelan Jawa dan segala macam lainnya. Di samping itu,

pemerintah juga ikut membentuk *Kukula* jenis baru yang disebut sebagai *Kakula* Rekayasa oleh Taman Budaya Sulawesi Tengah kala itu.

Menjelang berakhirnya kekuasaan orde baru, muncullah beberapa terobosan seperti kehadiran EMP (Ensambel Modero Palu). EMP merupakan *Kakula* kontemporer yang kehadirannya menjadi resistensi terhadap *Kakula* Kreasi Baru. Kelompok ini lebih cair karena sudah bisa memainkan lagu-lagu keroncong, dangdut dan mengaransemen lagu-lagu rakyat Kaili. Peranan personil wanitanya juga semakin luas, bisa sebagai penyanyi, pemain gong, hingga bertindak selaku pembicara atau MC. Para personilnya pun sudah berasal dari berbagai kalangan, seperti supir, tukang, pemilik warung, dokter, PNS hingga IRT. Mereka mendaulat dirinya dengan konsep *ethnotainment* yang digawangi oleh Mohammad Amin selaku *music director*.

Perkembangan *Kakula* dari masa ke masa seperti dijelaskan sebelumnya menunjukkan kekuatan dominasi kebijakan politik di wilayah kebudayaan yang turut campur mempengaruhi eksistensi *Kakula*. Kebijakan *top down* tersebut justru memperkuat logika politik seperti dijelaskan di awal. *Kakula* milik “kita”, bukan milik “mereka”. Hal itu nampak pada masa

kerajaan ketika hanya boleh dimainkan oleh dan diperuntukkan kepada kalangan *madika* dan *paranaka* saja. Begitu juga pada masa NIT, *Kakula* masih eksklusif bagi para pejabat pemerintah, bahkan pada masa Sukarno dan Suharto pemerintah turut menentukan versi *Kakula* yang representatif sebagai Identitas nasional. Barulah itu mulai cair ketika EMP hadir melibatkan pelaku dari berbagai latar belakang dan membuka diri dengan lagu-lagu selain yang dimainkan *Kakula* tradisional selama ini.

EMP hadir mencairkan sekat-sekat “kita” versus “mereka”. Namun, di sinilah titik tolak yang justru menjadi pembacaan “yang politis”.

Yang Politis dan Kesetaraan

Jika merunut pembacaan Mohammad Amin tentang *Kakula* dalam buku ini, hal yang dijadikan titik tolak adalah ketidaksetaraan, yaitu eksklusivitas *Kakula* bagi kalangan tertentu saja. Hal ini ditandai dengan narasi *Kakula* yang diawali pada masa kerajaan hingga pada era orde baru. Maka dari itu, kesetaraan menjadi sebuah tujuan yang diwakili dengan kehadiran EMP sebagai puncak klimaks narasi tentang *Kakula*.

Berbeda dengan Mohammad Amin, saya justru melihat kesetaraan sebagai

aksioma atau titik awal. Menjadikan kesetaraan sebagai aksioma merupakan langkah “yang politis” sekaligus “estetis”. Pada tataran ini, EMP menjadi titik awal menghadirkan “mereka” yang tidak masuk dalam tatanan yang telah dibentuk oleh “kita” selama ini.

Untuk memahami mendudukkan kesetaraan sebagai aksioma yang bertujuan sebagai langkah “yang politis” sekaligus estetis, saya mengajak kembali melihat konsep politik Plato, Aristoteles dan Marx. *Pertama*, Plato membagi kelas masyarakat menjadi tiga, yaitu golongan paling atas yaitu filsuf, cerdik cendikia, dan intelektual. *Kedua*, golongan menengah terdiri dari para kesatria, dan *ketiga* merupakan kelas bawah yang terdiri dari para tukang. Pemimpin suatu negara atau kota haruslah berasal dari golongan paling atas, golongan menengah cukup mejadi penjaga keamanan, sedangkan golongan paling bawah cukup menjadi pengrajin yang memproduksi kebutuhan sehari-hari. Tiap golongan ini tidak boleh saling dipertukarkan karena akan menimbulkan kerusakan sosial yang mengakibatkan kehancuran negara.

Aristoteles sedikit demokratis daripada Plato. Pemikirannya menempatkan warga negara memiliki hak

yang setara di dalam negara. Namun, tidak semua warga negara dapat menggunakan kesetaraannya. Hal itu disebabkan oleh adanya institusional yang berbentuk lembaga negara sebagai perwakilan kesetaraan. Sedangkan menurut Marx, kebenaran itu terdapat di luar politik, yaitu pada relasi produksi yang kemudian disebut ekonomi. Orang bisa saja terlihat setara namun sebenarnya tereksplorasi secara produksi ekonomi.

Berdasar dari tiga pemikiran ini, kita bisa melihat bahwa ketiganya mempertegas ketidaksetaraan sosial dalam pemikirannya. Ada peran yang dihilangkan dalam sebuah negara yaitu kelas bawah. Plato menganggap hanya kelas golongan atas yang layak hadir mengatur sebuah negara, Aristoteles menghilangkan suara kesetaraan melalui perwakilan institusi negara, sedangkan Marx hanya menganggap kesetaraan itu sebagai cita-cita. Semuanya menghilangkan peran “mereka” dari dominasi kuasa “kita”.

Mari kita kembali melihat *Kakula* dalam konteks kerajaan. Hanya para kalangan bangsawan dan keturunan Melayu saja yang berhak memainkan dan diperuntukkan. Golongan di luar garis tersebut tidak masuk dalam tatanan sosial dalam konteks *Kakula*. Mereka

diperhadapkan pada sebuah rezim moralitas dengan logika boleh dan tidak boleh. Hal itu juga mempertegas politik identitas bahwa hanya “kita” yang berhak daripada “mereka”. Cara pandang seperti ini menghilangkan peranan “mereka” dalam sebuah tatanan sosial yang dibentuk oleh “kita”.

Selanjutnya pada era NIT, ada sedikit pergeseran, namun *Kakula* masih terjebak dalam kuasa kerajaan dan pemerintah. Hal ini juga berlanjut pada era Sukarno yang justru memposisikan *Kakula* dalam konteks representasi identitas nasional. *Kakula* merepresentasikan identitas buatan dan diwakili oleh orang-orang yang dipilih oleh penguasa. Kondisi yang tidak jauh berbeda juga terjadi pada era orde baru, *Kakula* dibentuk oleh ideologi penguasa dan dimainkan oleh kalangan kerabat tertentu. Barulah pada akhir orde baru hingga era reformasi *Kakula* hadir dengan semangat kesetaraan, memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk mengeksplorasinya.

Di tataran akhir ini, saya ingin mengajak untuk melihat sebuah gerakan “yang politis” sekaligus estetis dalam konteks *Kakula*. Kehadiran EMP membantu kita menelusuri praktek tersebut. Penjelasan Mohammad Amin menunjukkan

keterlibatan berbagai macam pemain yang berasal dari latar belakang yang berbeda dalam EMP. Bahkan lagu-lagu yang dulunya tidak dimainkan dalam kesenian *Kakula* justru bisa dimainkan dalam kelompok ini. Golongan “mereka” yang selama ini tidak masuk dalam tatanan menghadirkan dirinya dengan cara menyamakan diri dengan golongan “kita”. Mereka ikut bermain *Kakula* tanpa memikirkan adanya batas-batas yang telah dibentuk oleh golongan “kita”. Upaya itu juga menjadi sebuah penyusunan kembali tatanan sosial yang awalnya tidak setara menjadi sebuah tataran yang setara.

IV. Kesimpulan

Hingga akhirnya, kita dapat mengatakan bahwa revolusi politik yang berbahaya bukanlah ketika golongan yang terpinggirkan bersatu dan melakukan aksi-aksi pemberontakan. Revolusi politik berbahaya jika golongan yang terpinggirkan mencoba mempelajari estetika, menciptakan atau memainkan karya seni seperti yang dilakukan oleh golongan penguasa. Melalui estetika, gerakan “yang politis” terlihat berangkat dari sebuah kesetaraan yang merusak tatanan ketidaksetaraan. Logika ini melampaui logika politik yang selalu mengandaikan

kesetaraan namun dalam praktiknya hanya membentuk logika identitas “kita” versus “mereka”.

Dalam kalimat lain, saya ingin mempertegas, bahwa “*jika engkau memainkan Kakula yang dapat menyentuh hati semua pihak, orang tidak akan memikirkan latar belakang sosialmu*”. Begitulah “yang politis” sekaligus “estetis” bekerja dalam sebuah konsep demokrasi.

V. Kepustakaan

- Ranciere, Jacques. 2004. *The Politics of Aesthetics. The Distribution of the Sensible*. New York: Continuum International Publishing Group.
- Amin, Mohammad. 2021. *Musik Itu Politik. Studi Pengaruh Kebijakan Kebudayaan pada Perubahan Musik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Indiyastutik, Sri. *Disensus*. 2019. *Demokrasi sebagai Perselisihan Menurut Jacques Ranciere*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.